



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA

BRMP SUMATERA BARAT

2025



Pertanian bekerja sepenuh hati
sumbar.brmp.pertanian.go.id


[@brmpsumaterabarat](https://www.instagram.com/brmpsumaterabarat)

LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

**Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Sumatera Barat**



Tim Penyusun:

Dr. Salwati, SP, M.Si

Tim Program dan Evaluasi BRMP SUMATERA BARAT

**Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2025**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRMP Sumatera Barat disusun berdasarkan 3 sasaran pada tahun 2025 yang kemudian dijabarkan kembali dan diukur pada 3 indikator kinerja sasaran. Secara operasional, kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan perumusan dan penerapan instrumen pertanian terstandar di Sumatera Barat.

Laporan Kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BRMP Sumatera Barat di tahun yang akan datang.



Sukarami, Desember 2025
Kepala Balai,

Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 197303071998032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini dibuat dan disampaikan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan BRMP Sumatera Barat pada tahun anggaran 2025 dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2025, kegiatan yang dilaksanakan BRMP Sumatera Barat mendapat dukungan pendanaan APBN melalui DIPA BRMP Sumatera Barat, DIPA BRMP Penerapan dan DIPA BRMP. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BRMP Sumatera Barat terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari tiga program utama, yaitu: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Total pagu anggaran BRMP Sumatera Barat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.013.402.000,-. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi, fasilitasi dan pembinaan lembaga, koordinasi, layanan dukungan manajemen internal dan layanan dukungan manajemen kinerja internal serta kegiatan lainnya sebesar 100%, evaluasi kinerja terpadu secara keseluruhan mencapai 100%, persentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,02% capaian rata-rata indikator kinerja sasaran sebesar 110% dengan kategori **sangat berhasil**.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Tercapainya realisasi kinerja tersebut karena beberapa hal diantaranya

1) kerjasama yang baik antara seluruh staf; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BRMP Sumatera Barat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, diantaranya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, penurunan produktivitas lahan, tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, serta rendahnya tingkat regenerasi petani.

Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektorsektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025- 2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam

berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan stunting. Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, melalui pengembangan ecp-region sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan untuk (a) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri melalui Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani agroforestry, revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (b) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (c) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (d) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (e) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/ pembudidaya ikan/petani hutan; serta (f) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan nature-based. solutioning pengelolaan bentang lahan terpadu, piloting bantuan langsung petani, kesehatan lahan, ISOIL, dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.

Pelaksanaan kinerja instansi suatu pemerintah memerlukan adanya evaluasi, evaluasi dilakukan sebagai suatu bentuk penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat aktivitas serta program suatu instansi pemerintah. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara serta kemampuan berinteraksi instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah tersebut adalah berupa

Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN). Evaluasi ini merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research) sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang lebih besar.

Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan pertanian yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Tahun 2025 adalah tahun peralihan instansi dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan BRMP ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP terbentuklah BRMP Sumatera Barat sebagai salah satu instansi yang berada di bawah koordinasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dan terletak pada Provinsi Sumatera Barat dengan tugas yaitu "Melaksanakan Penerapan Hasil Perakitan dan Perekayasaan Paket Teknologi Spesifik Lokasi serta Modernisasi Pertanian", dan memiliki fungsi yaitu:

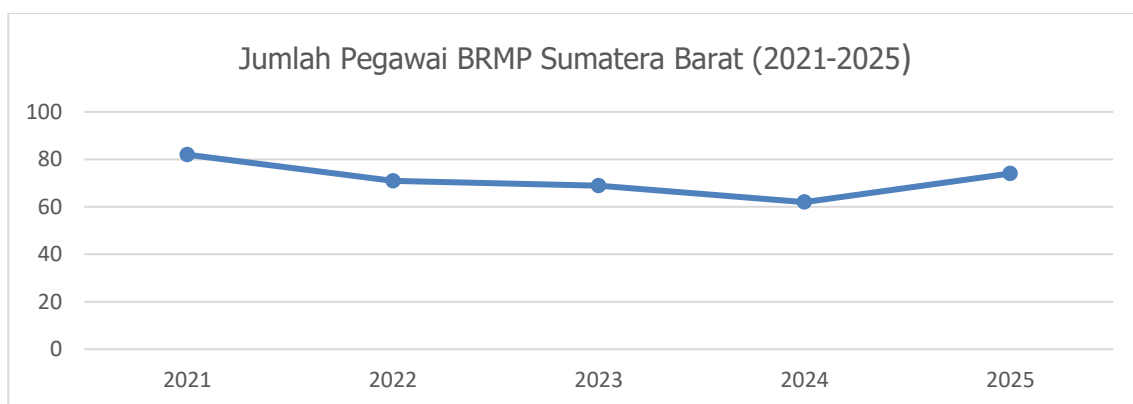
1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan

8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat terdiri atas Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala, selain itu Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat memiliki unit Instalasi Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP), Laboratorium Diseminasi dan Taman Teknologi Pertanian yang terdiri atas:

1. IP2MP Sukarami di Sukarami, Kab. Solok
2. IP2MP Bandar Buat di Bandar Buat, Kota Padang
3. IP2MP Rambatan di Rambatan, Kab. Tanah Datar
4. IP2MP Sitiung di Gunung Medan, Kab. Dharmasraya
5. Laboratorium Diseminasi di Padang, Kota Padang
6. Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Guguk, Kab. Lima Puluh Kota

BRMP Sumatera Barat pada Tahun 2025 memiliki 74 ASN yang terdiri atas 59 PNS dan 15 PPPK yang terbagi dalam jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. BRMP Sumatera Barat memiliki unit instalasi lain dan berada di luar Kantor Pusat BRMP Sumatera Barat, hal ini juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi BRMP Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu dalam pencapaian kinerja tersebut BRMP Sumatera Barat juga dibantu oleh 39 tenaga PPNPN yang tersebar pada 4 IP2MP, 1 Laboratorium Diseminasi, 1 dan 1 TTP. Pengembangan sumberdaya manusia yang ada di BRMP Sumatera Barat kedepannya sangat mempengaruhi tercapainya kinerja instansi dari BRMP Sumatera Barat. Grafik jumlah pegawai 5 tahun yang ada di BRMP Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar.1 berikut.



Gambar 1. Jumlah Pegawai ASN Lingkup BRMP Sumatera Barat (2021-2025)

1.3 Tantangan dan Peran Strategis

Modernisasi pertanian telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam proses inovasi, pengurangan biaya produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial (social responsibility).

BRMP dapat berperan dalam menyediakan fasilitas layanan yang dapat memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar Internasional. Kontribusi ini dapat menjadi nilai jual dan bargaining position BRMP di level nasional maupun internasional serta memastikan pemanfaatan produk hasil perakitan dan modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Tantangan dalam penggunaan teknologi pertanian modern diantaranya adalah akses, biaya, pengetahuan, infrastruktur, dan distribusi yang belum merata. Beberapa yang harus ditingkatkan adalah percepatan penggunaan teknologi modern antara lain melalui peningkatan literasi digital petani, dukungan finansial dan regulasi, penguatan infrastruktur digital pedesaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra BRMP Sumatera Barat disusun mulai tahun 2025. Dukungan kegiatan brmp untuk program Kementerian Pertanian dituangkan dalam dua Program, yaitu:

1. Program nilai tambah dan daya saing industri
2. Program dukungan manajemen

Adapun visi, misi dan tujuan dari BRMP Sumatera Barat yang terletak di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BRMP Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Visi:

Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju

Misi:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Tujuan Organisasi:

1. Terlaksananya perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional ;
2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern ;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi

- dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani ;
 5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

Sasaran Organisasi:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.2 Program dan Kegiatan BRMP Sumatera Barat

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada periode 2025 BRMP Sumatera Barat mendukung dua program Kementerian Pertanian. Program yang didukung, yaitu Program nilai tambah dan daya saing industri serta Program dukungan manajemen yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 dengan target sasaran, indikator dan target kinerja pada table 1. yang disandingkan dengan target pada Tahun 2024.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BRMP Sumatera Barat 2024- 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2024	2025
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	1	-
		Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Didampingi	Lembaga	1	-
2.	Terwujudnya Penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	1
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Unit	24	-
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM	Nilai	81	82,19
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,87	91

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 dirancang dengan mengintegrasikan Visi dan Misi Presiden bersama dengan arah kebijakan dalam RPJPN 2025–2045. Dokumen RPJMN ini menjadi landasan hukum bagi penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Untuk menjamin tercapainya prioritas pembangunan, sinergi antara proses perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat.

Dalam implementasinya BRMP perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mendukung pertanian modern yang berkelanjutan dan inklusif, memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung perekonomian nasional, peran BRMP sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk. Oleh karena itu dalam konteks pertumbuhan ekonomi, peningkatan komoditas pertanian dan daya saing produk melalui modernisasi pertanian tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya produksi, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan efektivitas tetapi juga memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Perakitan dan modernisasi pertanian merupakan perangkat strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang jika tidak diatasi akan menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan konsumen.

Modernisasi pertanian telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam proses inovasi, pengurangan biaya produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial (social responsibility). BRMP dapat berperan dalam menyediakan fasilitas layanan yang dapat memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar Internasional. Kontribusi ini dapat menjadi nilai jual dan bargaining position BRMP di level nasional maupun internasional serta memastikan pemanfaatan produk hasil perakitan dan modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dengan menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis. Strategi tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat. Pencapaian swasembada pangan tersebut mengacu kepada prioritas nasional 2 yakni: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Teknologi modern pertanian saat ini sudah banyak digunakan dengan skala yang terbatas diantaranya dalam bidang (1) Mekanisasi & Smart-Farming. Penggunaan traktor, combine harvester, transplanter, dan alat panen lainnya meningkat, namun distribusinya masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Smart-farming: sensor IoT untuk kelembaban tanah dan cuaca, sistem irigasi otomatis, software manajemen pertanian (seperti aplikasi pemantau dan pengairan), serta GPS digunakan di beberapa negara, dan mulai muncul di Indonesia. (2) Drone. Drone sprayer dan drone surveilans digunakan untuk pemetaan lahan, penyemprotan pestisida/pupuk, hingga penyebaran benih. Efeknya termasuk efisiensi penggunaan pestisida dan peningkatan produktivitas. Studi menunjukkan drone mampu meningkatkan efisiensi penyemprotan serta pengawasan tanaman, sekaligus menekan biaya. (3) Bioteknologi & Varietas Unggul. Penerapan varietas unggul padi, pupuk, dan bioteknologi mampu meningkatkan hasil panen kurang lebih 10% dan menekan biaya produksi sekitar 15%. (4) Smart Irrigation & Sensor Pertanian. Sistem irigasi pintar dan penggunaan sensor tanah/cuaca telah diuji coba di lahan konvensional dan sawah; memberikan efisiensi air, memantau kelembaban tanah, dan mencegah hama.

Tantangan dalam penggunaan teknologi pertanian modern diantaranya adalah akses, biaya, pengetahuan, infrastruktur, dan distribusi yang belum merata. Beberapa yang harus ditingkatkan adalah percepatan penggunaan teknologi modern antara lain melalui peningkatan literasi digital petani, dukungan finansial dan regulasi, penguatan infrastruktur digital pedesaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pertanian modern dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan, Dengan produktivitas yang lebih tinggi dan panen yang lebih stabil, pertanian modern membantu mengurangi kebutuhan impor pangan pokok (beras, kedelai, jagung, dll). Swasembada pangan tidak hanya soal kuantitas, tapi juga keberlanjutan. Teknologi modern memungkinkan praktik pertanian untuk (1) Hemat air dan pupuk, (2) Minim limbah dan dampak lingkungan, (3) tahan iklim ekstrem (melalui varietas tahan kering/hama). Pertanian modern juga berperan penting dalam regenerasi petani. Teknologi membuat pertanian lebih menarik, efisien, dan prospektif bagi petani milenial.

Kebijakan Perekrayasaan dan Perakitan Pertanian Modern Memperkuat standardisasi dan penilaian kesesuaian, perekrayasaan dan perakitan teknologi untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah daya saing, dan kemandirian nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumberdaya manusia

Strategi utama penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan sumberdaya manusia dilaksanakan dengan pengembangan tata kelola kelembagaan berbasis good governance, serta penguatan peran lembaga sebagai pusat inovasi yang responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian. Peningkatan sarana mencakup modernisasi fasilitas laboratorium, bengkel teknologi, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses perekrayasaan dan perakitan.

2. Membangun fondasi utama pertanian yang efisien, produktif, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian

Meningkatkan kualitas dan keamanan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan daya saing produk pertanian di pasar global melalui perumusan, penrapan, dan penilaian kesesuaian standar.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil rekayasa teknologi pertanian modern dan fokus pada output terapan, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi

Menghasilkan teknologi hasil rekayasa yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga relevan dan mudah diterapkan oleh pengguna. Peningkatan kualitas mencakup pengembangan teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan petani dan industri, efisiensi tinggi, serta berbasis pada hasil yang teruji. Sementara itu, peningkatan kuantitas mendorong percepatan proses perekrayasaan agar lebih banyak inovasi dapat dihasilkan dan

didiseminasikan. Fokus pada output riset yang aplikatif dan bernilai tambah tinggi berarti setiap teknologi yang dikembangkan harus memberikan dampak nyata, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, atau pengurangan biaya produksi. Dengan demikian, arah perekayasaan diarahkan untuk menghasilkan solusi yang konkret, ekonomis, dan langsung menjawab tantangan di sektor pertanian

4. **Percepatan hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang berorientasi pasar (market oriented)**

Proses hilirisasi, yaitu tahapan transisi dari output menuju penerapan nyata di pasar atau masyarakat. Hilirisasi dan komersialisasi menjadi kunci agar hasil perekayasaan tidak berhenti sebagai prototipe (purwarupa), tetapi benar-benar dimanfaatkan secara luas. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya membangun jembatan antara hasil perekayasaan dan perakitan dengan kebutuhan pasar, seperti melalui program bisnis teknologi, uji coba dalam skala terbatas dan luas (pilot project), serta pendampingan teknis maupun manajerial kepada pengguna atau pelaku usaha. Dengan memperkuat proses ini, inovasi teknologi dapat lebih cepat diadopsi, dikembangkan secara berkelanjutan, dan memberikan nilai ekonomi yang nyata.

5. **Pembangunan ekosistem inovasi dan jejaring multipihak (penta helix,). Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas**

Membangun ekosistem inovasi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta helix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan komunitas. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem inovasi yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pemanfaatan nyata hasil perekayasaan. Pemerintah berperan sebagai penyusun regulasi dan penyedia dukungan kebijakan, akademisi sebagai sumber pengetahuan dan riset, industri sebagai penggerak hilirisasi dan komersialisasi, serta komunitas sebagai pengguna dan penguji efektivitas teknologi di lapangan. Dengan membangun jejaring yang kuat antar keempat aktor ini, proses inovasi akan lebih terarah, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berpeluang besar untuk diadopsi secara luas dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

6. **Peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi ke sektor riil seperti petani, pelaku usaha (UMKM), maupun industri**

Memastikan bahwa hasil perekayasaan teknologi tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan, tetapi dapat diadopsi secara luas oleh pengguna akhir di sektor riil. Peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi bertujuan agar inovasi yang dihasilkan benar-benar digunakan oleh petani, UMKM, dan industri lokal, sesuai dengan kondisi dan kapasitas mereka. Untuk itu, teknologi yang dikembangkan harus bersifat tepat guna, mudah dioperasikan, terjangkau, serta relevan dengan kebutuhan pengguna. Proses diseminasi

perlu dilakukan secara terstruktur melalui berbagai pendekatan, seperti demonstrasi lapangan, pelatihan, pendampingan teknis, dan pengemasan dalam bentuk paket teknologi yang siap pakai. Dengan cara ini, inovasi dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing sektor pertanian di tingkat lokal maupun nasional.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mempertajam rencana pencapaian kinerja yang tertuang pada rencana strategis (renstra) maka setiap tahunnya BRMP Sumatera Barat menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Untuk tahun 2025, BRMP Sumatera Barat telah merencanakan untuk merealisasikan 4 indikator kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program BRMP Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Kepala BRMP Sumatera Barat bersama dengan Kepala BRMP.

Namun demikian, adanya pemblokiran anggaran dan beberapa hal lainnya yang terjadi selama tahun 2025 menyebabkan perlu dilakukan revisi dokumen perjanjian kinerja TA. 2025. Target Indikator Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Barat TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	82,19	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	91,00	Nilai (0-100)

Tabel 3. Program/ Kegiatan/ KRO/ RO BRMP Sumatera Barat Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO	Target	Satuan	PAGU Anggaran
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1.065.256.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			1.065.256.000
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2589	orang	1.035.256.000
7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	2589	orang	1.035.256.000
7911.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	lembaga	30.000.000
7911.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang Didampingi	1	lembaga	30.000.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			10.948.146.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi			10.948.146.000
6918.AEA	Koordinasi	1	Kegiatan	1.200.000.000
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1	Kegiatan	1.200.000.000
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.705.746.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	10.000.000
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	25.020.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	127.580.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.543.146.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	42.400.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	42.400.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas merupakan pilar utama dalam menjamin produksi dan pasokan pangan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan volume produksi, tetapi juga memastikan bahwa pangan tersedia secara merata, terjangkau secara ekonomi, dan mudah diakses secara fisik oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai aktivitas strategis dijalankan, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis ketahanan pangan, perekayasa efisiensi rantai nilai pangan dari hulu ke hilir, serta pengembangan peta wilayah rentan pangan sebagai dasar intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, dilakukan pula perakitan dan inovasi teknologi untuk mendorong diversifikasi pangan lokal, pengembangan produk olahan bernilai tambah, serta penerapan biofortifikasi dan fortifikasi guna meningkatkan kandungan gizi pangan. Sinergi dari seluruh aktivitas ini diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan konsumsi pangan bergizi, beragam, dan aman di tingkat rumah tangga.

Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertujuan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perekayasa serta modernisasi sistem pertanian nasional. Program ini berperan strategis dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan guna memastikan bahwa proses perakitan teknologi dan inovasi pertanian berjalan secara terarah, efisien, dan terintegrasi. Aktivitas dalam program ini mencakup fasilitasi penguatan kapasitas SDM perekayasa, pengembangan sistem informasi dan pemantauan kinerja teknologi, serta harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor. Selain itu, dukungan diberikan untuk memperkuat jejaring kolaborasi multipihak (quatro helix) antara pemerintah, lembaga riset, industri, dan komunitas pengguna teknologi. Dengan adanya dukungan manajemen yang efektif, proses modernisasi pertanian melalui adopsi teknologi tepat guna, mekanisasi, digitalisasi, dan efisiensi rantai nilai dapat diakselerasi secara berkelanjutan, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan. Untuk mengukur capaian kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025, digunakan metode scoring terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80-100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%)
4. Kurang berhasil (capaian <60%)

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 yang dilaporkan

pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BRMP Sumatera Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025, BRMP Sumatera Barat telah menetapkan 3 indikator kinerja sasaran, dimana realisasi capaian kinerja BRMP Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan realisasi persentase rata-rata sebesar 110% (**sangat berhasil**). Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan mendukung tugas dan fungsi BRMP, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen fasilitasi standarisasi instrumen pertanian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana.

3.1 Capaian Kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025

Selama periode Renstra 2025, BRMP telah mengalami transformasi kelembagaan menjadi BRMP sehingga mengalami perubahan tugas dan fungsi. Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Sumatera Barat tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaiannya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Barat pada Tahun 2025, mempunyai 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, dengan target dan realisasi kinerja seperti pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja BRMP Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	5	110	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya birokrasi BRMP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembagunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada BRMP Sumatera Barat (Nilai)	82,19	83,78	110	Sangat Berhasil

3	Terwujudnya Anggaran BRMP yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Sumatera Barat (Nilai)	91	92,89	110	Sangat Berhasil
Nilai Rata- rata					110	Sangat Berhasil

Sasaran 1.
Terwujudnya Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh
Pelaku Usaha Tani

Sasaran 1. Pada perjanjian kinerja BRMP Sumatera Barat terdiri atas 1 indikator kinerja yaitu "Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan".

Kegiatan Pendampingan Penerapan Usaha Tani Kakao di Sumatera Barat memiliki target untuk mendampingi satu lembaga yang menerapkan usaha tani kakao di Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya tim pendampingan penerapan usaha tani melakukan pendampingan pada 5 lembaga yaitu PT. Chokato Tumbuh Bersama di Kota Payakumbuh, IKM Chocoliko, Kelompok tani Inovasi, Kelompok Sejahtera dan Kelompok tani Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota. PT. Chokato Tumbuh Bersama dan IKM Chocoliko merupakan industri kecil menengah yang menghasilkan biji kakao kering dan mengolahnya menjadi aneka olahan coklat seperti bubuk, lemak, permen, minuman, dll merujuk pada SNI 2323:2008/Amd1:2010 tentang biji kakao dan SNI 3747:2013 tentang bubuk kakao. Pendampingan dilakukan dalam proses produksi biji kakao fermentasi kering sampai ke proses pengolahan bubuk kakao. Sedangkan pada kelompok tani Inovasi, Sejahtera dan mandiri dilakukan pendampingan dalam proses produksi biji kakao fermentasi kering (SNI 2323:2008/Amd1:2010).

Pada tahun 2025 ini PT. Chokato Tumbuh Bersama telah mendapatkan sertifikat SNI 3747:2013 tentang bubuk kakao pada bulan Maret 2025. Sedangkan IKM Chocoliko baru sampai proses pendampingan penyusunan dokumen dan kelengkapan, serta pendampingan dalam pendaftaran pengajuan SPPT SNI melalui Siinas. Proses pendampingan pada kelompok tani Inovasi, Sejahtera dan mandiri tahun 2025 ini meliputi pendampingan dalam pengolahan biji kakao menjadi biji kakao fermentasi kering serta proses pendaftaran SNI Bina UMK yang bersifat sukarela. Pada tahun 2025 ini telah terbit tanda daftar SNI bina UMK produk biji kakao untuk anggota perwakilan kelompok tani Inovasi, Sejahtera dan mandiri. Pada tahun mendatang diharapkan pendampingan dilanjutkan terhadap komitmen dalam penerapan standar pengolahan biji kakao fermentasi sehingga kualitas biji kakao dapat terjaga.

Sasaran 2.

Terwujudnya birokrasi BRMP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran 2. Terwujudnya birokrasi BRMP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada BRMP Sumatera Barat (Nilai).

Indikator kinerja ini dinilai oleh Tim Penilai Internal lingkup Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot 60% dan komponen hasil memiliki bobot 40%. Dalam mencapai target nilai ZI berdasarkan perjanjian kinerja makan BRMP Sumatera Barat mengimplementasikan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di pada 6 (enam) area yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, nilai akhir yang didapatkan oleh BRMP Sumatera Barat berdasarkan nilai oleh Tim Internal Kementerian Pertanian adalah sebesar 83,78.

Sasaran 3.

Terwujudnya Anggaran BRMP yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran 3. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Sumatera Barat (Nilai).

Nilai IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja suatu satuan kerja. Nilai IKPA dihitung berdasarkan 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja. Dalam pencapaian nilai kinerja berupa Nilai IKPA, BRMP Sumatera Barat melakukan beberapa hal diantaranya memastikan target penyerapan anggaran tercapai, menjaga konsistensi rencana penarikan dana bulanan dan meningkatkan ketertiban serta ketepatan waktu dalam revolving UP, pertanggungjawaban TUP, penyelesaian tagihan dan pelaporan capaian output.

Berdasarkan nilai IKPA yang terupdate pada aplikasi OMSPAN, BRMP Sumatera Barat mencapai nilai IKPA sebesar 92,89 pada akhir tahun 2025.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Realisasi capaian indikator kinerja BRMP Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaiannya terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Proses pemblokiran dan buka blokir anggaran yang terjadi, hal ini menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan
2. Keterbatasan sumber daya manusia ditengah penyesuaian tugas dan fungsi yang baru dan rangkaian kegiatan yang relatif padat

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut untuk pencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Pengaturan rencana/ schedule kegiatan
2. Melakukan konsultasi insentif dengan BSN
3. Melibatkan sumber daya manusia dari institusi mitra
4. Mempercepat peralihan SDM fungsional lama ke fungsional pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait SNI instrumen pertanian

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

BRMP Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 juga melakukan capaian kinerja lainnya selain dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja, capaian kinerja lainnya yang dicapai tersebut adalah berkaitan dengan diseminasi standar instrumen pertanian.

3.3.1 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Diseminasi standar instrumen ini dilakukan dengan menyasar pelaku dan pelaku usaha pertanian, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Standar instrumen didiseminasikan melalui pemberdayaan dan penerapan standar pertanian yang dilakukan pada Kebun Percobaan BRMP Sumatera Barat yang tersebar pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan diseminasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis, talkshow, pameran, kunjungan ke PPID, kunjungan ke Taman Agrostandar dan kegiatan diseminasi lain pada kegiatan Agrofest BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 dengan output jumlah orang yang mendapatkan diseminasi adalah sebesar 3.251 orang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 5. Sebaran Jumlah Realisasi Diseminasi BRMP Sumatera Barat Tahun 2025

No	Judul Acara Pelaksanaan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Jumpa Pakar Tanaman Kelapa Sawit- Kebun Percobbaan Sitiung	15-16 Oktober 2025	1.018
2	Agro Eduwisata Kakao-TTP Guguak	06 November 2025	156
3	Modernisasi Pertanian Perkotaan Mendukung Ketahanan pangan- Labor Diseminasi Padang	03 Desember 2025	153
4	Agrofest- Talkshow Agropreneurship: Startup Komunitas Kopi dan Pertanian Organik	10 Desember 2025	119
5	Agrofest- Launching Inovasi Pelayanan PPID BRMP Sumatera Barat	10 Desember 2025	294
6	Agrofest- Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian dalam Swasembada Pangan	11 Desember 2025	133
7	Agrofest- Bimbingan Teknis Ayam KUB	11 Desember 2025	121
8	Agrofest- Bimbingan Teknis Hortikultura	11 Desember 2025	68
9	Agrofest- Pameran Teknologi, Demo Lapangan, Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dan Expo	10- 11 Desember 2025	537
10	Kunjungan Taman Agromodern BRMP Sumatera Barat	September- Desember 2025	317
11	Bimbingan Teknis Kupas Tuntas Ayam KUB	16 Desember 2025	285
12	Bimbingan Teknis Pengembangan Kambing Boerka dan Olahan Silase dari Limbah Jagung	18 Desember 2025	50
Total			3.251

3.3.2 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Sumatera Barat

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Barat memegang peran strategis dalam mengawal implementasi program strategis dan penerapan teknologi inovatif spesifik lokalita. Pengawasan dan Pendampingan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha dan Industri, Perbankan, Swasta, dan Lembaga lain turut terlibat dalam pengembangan Pertanian Modern.

Pembangunan pertanian modern yang digagas oleh Kementerian Pertanian menjadi salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang ada dalam hal ini adalah lahan yang belum tergarap secara maksimal dengan meluncurkan kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Padi Gogo. Kegiatan Oplah dan Padi Gogo dilakukan dalam upaya untuk peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman.

Melalui pendekatan yang komprehensif, peningkatan produksi padi melalui pertanian modern tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga kapasitas petani khususnya generasi muda, serta penciptaan model bisnis pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi dengan membentuk Brigade Pangan.

Dengan demikian, BRMP Sumatera Barat memegang peran strategis dalam mendukung dan mensukseskan program Swasembada Pangan Presiden Prabowo melalui pendampingan intensif terhadap pelaksanaan seluruh program strategis Kementerian Pertanian di Sumatera Barat, guna mempercepat peningkatan produksi, penguatan kapasitas petani, dan terwujudnya pertanian modern yang berdaya saing.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan Swasembada Pangan Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat, secara umum seluruh program strategis Kementerian Pertanian yang meliputi LTT Reguler, Optimasi Lahan, LTT Padi Gogo, serta pembentukan Brigade Pangan telah berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang positif. Penyaluran bantuan benih bersertifikat seluas 102.018 Ha dan bantuan alsintan pra panen telah mendukung percepatan kegiatan tanam dan peningkatan efisiensi kerja petani. Capaian LTT Reguler mencapai 373.097,83 Ha, sementara LTT Olah telah memasuki tahap konstruksi dan olah lahan dengan progres signifikan. LTT Padi Gogo mencapai 3.598,14 Ha (56,73%) meskipun menghadapi kendala logistik benih dan pestisida. Pembentukan Brigade Pangan telah terealisasi 99% (123 dari 124 kelompok), dengan kendala terbatas pada Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Secara keseluruhan, koordinasi lintas sektor, pendampingan aktif BRMP Sumatera Barat, serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama keberhasilan implementasi program, sehingga target Swasembada Pangan 2025 berpotensi tercapai apabila percepatan terus dijaga hingga akhir tahun.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025, BRMP Sumatera Barat melakukan 15 kali revisi dari DIPA awal, revisi ini terjadi karena beberapa hal, yaitu revisi anggaran penyesuaian pagu PNPB dan penyesuaian pagu anggaran belanja pegawai serta beberapa revisi lain yang disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan diantaranya realokasi anggaran internal BRMP dan pemblokiran anggaran.

Pagu anggaran terakhir pada revisi ke 15 dari pagu awal adalah sebesar Rp12.013.402.000,- (anggaran terblokir: Rp. 325.524.000,-), anggaran ini terdiri atas Belanja Pegawai Rp, 4.855.296.000,-; Belanja Barang Rp7.158.106.000,-. Dari total pagu tersebut BRMP Sumatera Barat merealisasikan sebanyak Rp 11.655.750.263,- atau 97,02% dari total pagu anggaran.

Tabel 6. Perubahan Pagu Anggaran Awal sampai dengan Pagu Revisi 15

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Pagu Awal	5.044.180.000	5.230.418.000	-	10.274.598.000
2	Pagu Rev 1	5.044.180.000	5.230.418.000	-	10.274.598.000
3	Pagu Rev 2	5.044.180.000	5.230.418.000	-	10.274.598.000
4	Pagu Rev 3	5.044.180.000	6.330.418.000	-	11.374.598.000
5	Pagu Rev 4	5.044.180.000	6.330.418.000	-	11.374.598.000
6	Pagu Rev 5	5.044.180.000	6.330.418.000	-	11.374.598.000

7	Pagu Rev 6	5.044.180.000	6.330.418.000	-	11.374.598.000
8	Pagu Rev 7	5.044.180.000	6.330.418.000	-	11.374.598.000
9	Pagu Rev 8	4.855.296.000	6.101.218.000	-	10.956.514.000
10	Pagu Rev 9	4.855.296.000	6.101.218.000	-	10.956.514.000
11	Pagu Rev 10	4.855.296.000	6.858.106.000	-	11.713.402.000
12	Pagu Rev 11	4.855.296.000	7.158.106.000	-	12.013.402.000
13	Pagu Rev 12	4.855.296.000	7.158.106.000	-	12.013.402.000
14	Pagu Rev 13	4.855.296.000	7.158.106.000	-	12.013.402.000
15	Pagu Rev 14	4.855.296.000	7.158.106.000	-	12.013.402.000
16	Pagu Rev 15	4.855.296.000	7.158.106.000		12.013.402.000

Tabel 7. Serapan Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	4.855.296.000,-	4.836.461.007,-	99,61
Belanja Barang	7.158.106.000,-	6.819.289.256,-	95,27
Jumlah	12.013.402.000,-	11.655.750.263,-	97,02

Dari tabel realisasi anggaran per kegiatan diatas (Tabel. 7) menunjukkan bahwa serapan anggaran per kegiatan BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 97,02% dari total anggaran yang ada termasuk anggaran yang terblokir sebesar Rp 325.524.000,-. Dua kegiatan yang mendukung semua kegiatan memiliki realisasi diatas 95%. Hal ini dapat dicapai karena adanya beberapa hal diantaranya 1) kerjasama yang baik antara seluruh staf BRMP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BRMP Sumatera Barat.

BAB IV. PENUTUP

Program kegiatan yang dilakukan oleh BRMP Sumatera Barat adalah mendukung program Kementerian Pertanian dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian. Bentuk dukungan utamanya adalah berupa penyusunan rancangan standar instrumen pertanian, penyediaan benih serta pemanfaatannya. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama BRMP Sumatera Barat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari tiga program utama, yaitu: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Total pagu anggaran BRMP Sumatera Barat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.013.402.000,-. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi, fasilitasi dan pembinaan lembaga, koordinasi, layanan dukungan manajemen internal dan layanan dukungan manajemen kinerja internal serta kegiatan lainnya sebesar 100%, evaluasi kinerja terpadu secara keseluruhan mencapai 100%, persentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,02% capaian rata-rata indikator kinerja sasaran sebesar 110% dengan kategori **sangat berhasil**.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Tercapainya realisasi kinerja tersebut karena beberapa hal diantaranya 1) kerjasama yang baik antara seluruh staf; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BRMP Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRMP Sumatera Barat secara umum didukung dengan adanya: 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik, 2. Pelaksanaan Koordinasi secara berjenjang di BRMP Sumatera Barat hingga ke Eselon 1, 3. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun Kementerian lainnya serta pemerintah daerah.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja adalah dengan : 1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan, 2) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat, 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal BRMP, 4) Melakukan penambahan sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, dan 5) Melakukan penyusunan analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.